

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, Asikin, Z., 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indrayana, D., 2016, Jangan Bunuh KPK : Kajian hukum tata negara penguatan komisi pemberantasan korupsi, Intan Publishing, Malang.
- Kuswandi, et al. 2019. Jalan Sunyi Pemberantasan Korupsi : Cerita di Balik Kinerja Tim Korsupgah KPK, KPK, Jakarta.
- Mochtar, Z.A., 2016. Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maleong, L.J., 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Marzuki P.M., 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta.
- Hadjon, P.M., et al., 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Hartini, S., Sudrajat, T., 2017, Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, S., Mamudji, S., 2003, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. Ke 8, Alfabeta, Bandung.

B. Jurnal/Artikel

- Fitriawan, M. J. “Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara”, *Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 1, Januari, 2021

- Parama, J.F, Al-Fatih, S., “Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif”, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, No. 1, Juni, 2021.
- Haryati, D., Saputra, Y., “Status_Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik Dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menunjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Jurnal Widaya Pranata, Vol. 3, No.1, Februari, 2020
- Haryono, P. F., Dewi, E.Y.R.S., Arianto, L.D.M., Dampak Independensi dan Produk Peraturan Hukum KPK atas Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”, Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”, Vol. II, Juni, 2021
- Kaligis, R. V., 2021 “Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen, Vol. IX, No. 1, Januari-Maret, 2021
- Miranda Risang Ayu, “Kedudukan Komisi Independen sebagai State Auxaliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Konstitusi,
- Tauda, Gunawan A., “Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Pranata Hukum, Vol. 6 No. 2, Juli 2011,
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., Jaya, N. S. P., “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?, Jurnal Ilmu Hukum”, Vol. 4 No. 2, Juni, 2020

C. Karya Ilmiah

- Fitriawan, M.J., 2021, Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Jawa Timur
- Kaligis, R.V., 2021, Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sam Ratu Langi, Sulawesi Utara.
- Kurniawan, R., 2021, Perbandingan Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peratunran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor

63 Tahun 2005 , Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Prihantoro, A.M., 2010, Eksistensi State Auxiliary Organs Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance di Indonesia (Studi Kelembagaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universtas Sebelas Maret, Surakarta.

Wulandari, W.S., 2021, Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau,

D. Internet

Aji Prasetyo, 2021, 4 “Potensi Masalah Alih Status Pegwai KPK Menjadi ASN”, Hukum Online, Jakarta, <https://m.hukumonline.com/> diakses pada 22 Juli 2021

BBC Indonesia, 2020 “Gugatan status ASN pegawai KPK ditolak MK, pertanyaan Novel Baswedan dipecat mencuat”, <https://www.bbc.com/indonesia/>, diakses pada 30 Juni 2021

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. <https.kbbi.web.id.>, diakses pada 15 November 2021

CNN Indonesia, 2020, “ICW ungkap 3 Dampak Peralihan Pegawai KPK menjadi ASN” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/> Diakses pada 20 Juli 2021

Dani Prabowo, 2021, “Bakal Jadi ASN, Berapa Gaji yang Diterima Pegawai KPK?”, <https://nasional.tempo.co/read/1460795/bkn-jelaskan-beda-tes-kebangsaan-cpns-dan-pegawai-kpk>, diakses pada 10 November 2021

Feri Lubis, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2021, “Rilis Pers Komnas HAM mengenai pelanggaran HAM atas Proses Asesmen TWK di KPK”, <https://www.komnasham.go.id/>, diakses pada 12 November 2021

Irfan Kamil, [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2021/12/09/15510361/tak-diundang-pelantikan-eks-pegawai-kpk-jadi-asn-polri-pimpinan-kpk-mereka?page=all#google_vignette), Tak Diundang Pelantikan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Pimpinan KPK: Mereka Orang Bebas..., https://nasional.kompas.com/read/2021/12/09/15510361/tak-diundang-pelantikan-eks-pegawai-kpk-jadi-asn-polri-pimpinan-kpk-mereka?page=all#google_vignette, diakses pada 14 Desember 2021

Kompas.com, 2020, “Ini 26 Poin UU KPK Hasil Revisi yang Beresiko Melemahkan KPK”, <https://nasional.kompas.com/>, diakses pada 26 Juni 2021.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2020, “KPK Identifikasi 26 Poin yang Beresiko Melemahkan KPK”, <https://KPK.go.id/>, diakses pada 25 Juni 2021.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2020, “Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, <https://kominfo.go.id/>, diakses pada 25 Juni 2021.

M Rosseno Aji, 2021, “Hari ini, 57 Pegawai KPK Resmi dipecat”, Tempo.co, Jakarta, <https://nasional.tempo.co/>, diakses pada 4 Oktober 2021

Nicholas Ryan Aditya, kompas.com, Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/07/09350661/alih-status-eks-pegawai-kpk-44-siap-jadi-asn-polri-8-menolak-4-dalam?page=3>, diakses pada 14 Desember 2021

Tim Detik, 2021, “Pimpinan KPK akui TWK tak diatur UU, begini penjelasannya, detiknews.com”, <https://news.detik.com/berita> diakses pada 25 september 2021

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581)

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164)

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komis Pemberantasan Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Nilai Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1234)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1001)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 286)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Khusus dari 57 (Lima Puluh Tujuh) Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1308)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

F. Wawancara

Sujanarko, 2021, Wawancara dengan salah satu Mantan Direktur KPK, Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C1, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Novel Baswedan, 2021, Wawancara dengan salah satu Penyidik KPK, Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C1, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Yudi Purnomo, 2021, Wawancara dengan Ketua Wadah Pegawai KPK, Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada, Kav. 4, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta